

Menguatkan Kerja Kolektif Masyarakat Sipil di Tanah **Papua**

Catatan Penilaian Situasi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik Regio Papua
2026



Civic Engagement Alliance
2026



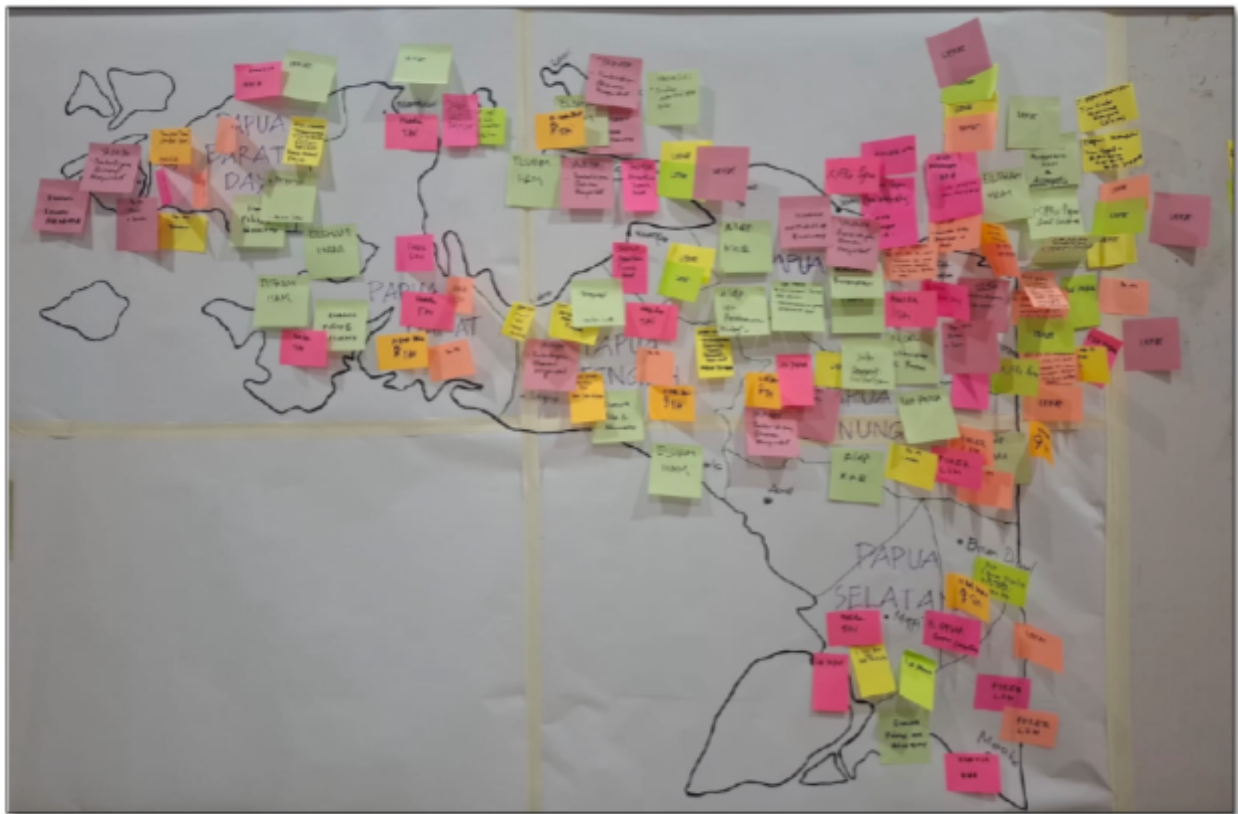
Potret Demografi, Ekonomi, dan Daya Dukung Ekologis

Pulau Papua merupakan salah satu kawasan hunian manusia tertua di dunia yang telah dihuni setidaknya sejak 40.000–50.000 tahun lalu ketika Pulau Nugini dan Australia masih terhubung dalam satu bentang daratan besar yang dikenal sebagai Sahul. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Papua telah mengembangkan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang beragam melalui ratusan kelompok etnis dan bahasa yang tersebar dari wilayah pesisir hingga pegunungan pedalaman. Berbeda dengan sebagian besar wilayah Nusantara yang berkembang melalui kerajaan-kerajaan terpusat, masyarakat Papua umumnya membangun tatanan sosial berbasis marga, klan, dan komunitas adat dengan sistem kepemimpinan yang beragam, termasuk model kepemimpinan berbasis pengaruh sosial (*big man*) di wilayah pegunungan serta kerajaan-kerajaan lokal di beberapa kawasan pesisir dan kepulauan. Meskipun demikian, Papua bukanlah wilayah yang terisolasi. Sejak berabad-abad lalu, berbagai komunitas di pesisir Papua telah terhubung dengan jaringan perdagangan regional yang melibatkan Maluku, Seram, Tidore, Ternate, hingga kawasan Pasifik Barat melalui perdagangan burung cenderawasih, kulit masoi, damar, mutiara, hasil laut, dan berbagai komoditas hutan lainnya.

Secara administratif, Provinsi Papua telah beberapa kali berganti nama. Di tahun 1946, dikenal dengan nama Irian. Bernama Irian Barat pada 1969–1973 dan Irian Jaya pada 1973–2002. Sesudah reformasi, berubah menjadi Papua sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Di tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua Provinsi yaitu Papua di bagian timur dan Irian Jaya Barat (sekarang Provinsi Papua Barat) di sebelah barat. Saat ini, daratan Papua telah dibagi menjadi enam provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Secara geografis, Provinsi Papua berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik (Utara), Provinsi Papua Barat (Barat), Papua Nugini (Timur), dan Laut Arafuru (Selatan).

Hingga sekarang, kehidupan masyarakat Papua sangat lekat dengan adat. Secara etnologi, terdapat lebih dari 250 suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Selain itu, Papua dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Banyak spesies flora dan fauna hidup di hutan Papua. Ditambah adanya hutan hujan tropis yang luas hingga kekayaan biota laut sebagai aset penting bagi kelestarian alam. Hal tersebut menggambarkan bahwa Papua memiliki ekosistem luar biasa. Namun, kondisi sosio-ekologis Papua tengah menghadapi ancaman serius dari deforestasi karena ekspansi perkebunan, alih fungsi lahan

untuk proyek strategis nasional, termasuk konflik bersenjata yang mengakibatkan gelombang pengungsian masyarakat pribumi.



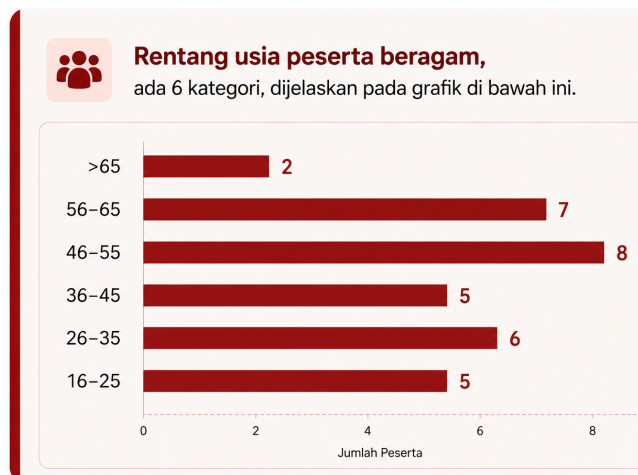
Gambar 1. Peta membaca konteks Papua

Penilaian Partisipatif Kondisi Ruang Sipil dan Keterlibatan Publik

Penilaian kondisi ruang sipil dan keterlibatan publik yang dilakukan menggunakan instrumen CIVICA yang dikembangkan oleh Civic Engagement Alliance (CEA) Indonesia untuk membaca, memahami, dan merefleksikan ruang sipil dan ruang pelibatan masyarakat sipil berbasis dinamika dan konteks pada masing-masing wilayah di Indonesia secara partisipatif dan mandiri. Instrumen ini dirancang untuk menghadirkan proses belajar, perubahan, dan kolaborasi yang tumbuh di tingkat lokal dan regional.

Melalui dua arena/blok utama yaitu Civic Space dan Civic Engagement, CIVICA membantu masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan jejaring mitra memahami tiga aspek utama, yaitu, bagaimana ruang sipil terbuka dan dimanfaatkan, bagaimana masyarakat sipil memperkuat keterlibatan publik dan bagaimana konektivitas antaraktor dan antarwilayah berkontribusi pada keberlanjutan gerakan.

Refleksi Ruang Sipil & Keterlibatan Masyarakat Sipil



Gambar 2. Keberagaman Usia Peserta

Konsolidasi ini memiliki rangkaian agenda meliputi pengenalan satu sama lain sekaligus pengenalan tentang CEA, pembacaan konteks, hingga membahas agenda ke depan. Sebelum membahas ruang sipil dan keterlibatan sipil, peserta mendiskusikan tentang konteks di Papua. Salah satunya mengenai sebaran kerja OMS. Wilayah kerja OMS di Papua menjangkau semua Tanah Papua. Setidaknya di setiap kabupaten/kota terdapat satu OMS yang bekerja.

Jangkauan wilayah kerja OMS merupakan kekuatan bagi gerakan masyarakat sipil di Papua.

Namun, konektivitas lintas isu/sektor belum terbangun dengan cukup baik. Jangkauan yang luas juga menyisakan pertanyaan tentang sumber daya yang besar dan dukungan sistem perlindungan akibat intervensi militer yang tinggi. Perlu kecanggihan dalam advokasi karena perlu perbedaan pendekatan untuk advokasi di wilayah pedalaman atau pegunungan dengan wilayah pesisir.

Masyarakat sipil di Papua menggelar konsolidasi pada 11-12 Februari 2026 di Sentani, Jayapura, Papua. Latar belakangnya berkaitan dengan pembacaan situasi yang ditemukan beberapa konsolidasi masyarakat sipil se-Nasional. Tentu pembacaan situasinya juga terkait situasi lokal. Konsolidasi ini melibatkan lintas pihak dan lintas isu yang berasal dari Papua. Peserta yang hadir sebanyak 33 orang dari 19 organisasi.

■ Titik Kritis Papua:

1. Geografis: pegunungan, pulau-pulau
2. Keamanan: wilayah konflik
3. Potensi SDA
4. Tingkat kemahalan
5. Akses dan keterbukaan daerah

Gambar 3. Titik Kritis di Papua

Refleksi menohok juga tersampaikan oleh pihak gereja tentang gerakan masyarakat sipil di Papua. Situasi banyaknya masyarakat sipil dan stigma terhadap Papua mengawali refleksinya bahwa kita sebenarnya sedang melakukan apa untuk Papua selama ini. Saat ini, Papua juga dihadapkan berbagai ketakutan, trauma, dan kebijakan nasional yang berimbas ke Papua. Maka dari itu, masyarakat sipil di Papua perlu memperkuat kerja kolektif yang tidak hanya berfokus pada isu HAM, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Kapasitas analisis kritis terhadap kebijakan menjadi aspek penting untuk gerakan masyarakat sipil di Papua.

Catatan Kritis terhadap Ruang Sipil dan Keterlibatan di Sumbagsel

Penilaian, eksplorasi, dan refleksi berbasis CIVICA di Regio Papua membuka gambaran tentang kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi yang saling terkait dan menopang keberadaan ruang sipil. Gambaran singkat dari refleksi terhadap tujuh dimensi dari blok Kondisi Ruang Sipil (Civic Space) dan Keterlibatan Publik (Civic Engagement) adalah sebagai berikut:

Dimensi Pengorganisasian Basis atau Komunitas

Praktik-praktik pengorganisasian yang oleh masyarakat sipil di Papua sangat beragam. Pengorganisasian tidak dapat dilakukan dengan pendekatan satu isu atau sektor karena situasinya kompleks. Pengorganisasian juga berjalan menyesuaikan konteks dan tantangan berupa jarak, biaya, administrasi wilayah, keamanan, dan demografi (termasuk gap generasi). Di Papua, OMS mengembangkan berbagai strategi pengorganisasian seperti pendekatan tiga tungku: tokoh adat, agama, dan pemerintah desa/lurah. Masyarakat sipil juga melakukan pendampingan melalui penguatan paralegal komunitas, pemberdayaan ekonomi, hingga pengorganisasian kelompok perempuan dan masyarakat pesisir. Beberapa lembaga pada akhirnya mampu melahirkan kader-kader di masyarakat meskipun belum kuat untuk menopang kerja pengorganisasian jangka panjang dan berkelanjutan.

Rekomendasi Prioritas

1. Pembacaan ulang konteks pengorganisasian.
2. Pemetaan potensi-potensi pengorganisasian di setiap organisasi dengan menyesuaikan lanskap.
3. Menyusun strategi pengorganisasian yang mampu mengoneksikan kekuatan.

Dimensi Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil di Papua mulai membangun sistem pengelolaan pengetahuan bersama melalui jaringan, forum, dan kolaborasi lintas organisasi, termasuk pertukaran pengetahuan, penggunaan data untuk advokasi, serta perhatian terhadap isu keamanan seperti data dan informasi. Karena kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya keamanan juga tumbuh, OMS di Papua membangun jejaring yang aman. Selain itu, terdapat upaya untuk mewujudkan ruang masyarakat sipil menjadi ruang aman bagi semua entitas masyarakat sipil, termasuk perempuan, anak, ragam gender, dan disabilitas. Meski demikian, isu perlindungan dan keamanan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai kapasitas yang meluas dan kelembagaan. Sementara itu, ruang berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas masih terbatas pada OMS dengan kesamaan isu, sektor, atau program.

Rekomendasi Prioritas

1. Menemukan isu-isu prioritas bagi peningkatan kapasitas yang bisa dikolaborasikan di ruang belajar bersama
2. Membangun strategi kolaborasi untuk peningkatan kapasitas bersama.

Dimensi Konektivitas Masyarakat Sipil

Gap generasi yang terjadi pada masyarakat sipil Papua dapat berupa penggunaan kata-kata asing dan perbedaan pola pikir tua-muda. Salah satu upaya mengikisnya melalui mengadakan diskusi-diskusi membahas situasi Papua dan peran pemuda. Ini menjadi penting karena pergerakan dan pertumbuhan OMS semakin bertambah dan diisi bahkan dipimpin oleh orang-orang muda. Di sisi lain, inisiatif pemetaan profil, keahlian, dan kepakaran OMS cukup baik di Papua meskipun keterhubungan masih sesuai isu atau program. Ada kesepakatan yang terbangun di kalangan OMS terkait pembagian peran OMS, seperti penulisan konten, penyusunan policy brief, strategy planning, dll. Potensi itu sayangnya belum sepenuhnya menjadi modal memperkuat posisi tawar untuk membangun kerjasama. Padahal, penting untuk memastikan isu-isu daerah menjadi isu prioritas saat menjalin komunikasi di tingkat nasional atau regio untuk membuka gap kapasitas dan penyelesaian persoalan di Papua.

Rekomendasi Prioritas

1. Memperluas ruang-ruang pelibatan orang muda, baik di organisasi maupun di ruang bersama lintas organisasi dan mengajak orang muda untuk memiliki kemampuan membaca konteks dimana mereka terlibat, termasuk kemampuan melakukan pemetaan aktor
2. Membangun strategi komunikasi yang efektif untuk konektivitas Masyarakat sipil dengan berbagai kelompok kepentingan.
3. Menemukan isu-isu penting yang bisa jadi jembatan konektivitas Masyarakat sipil.

Dimensi Mobilisasi Sumberdaya

Berbagai praktik kolaborasi pendanaan dilakukan oleh OMS di Papua, mulai dari dukungan bersama untuk kegiatan advokasi, kampanye kemanusiaan, kegiatan bersama, hingga pendampingan masyarakat adat. Pendanaan kolaboratif itu berasal dari menghimpun dana atau sharing dana program. Selain mengakses dukungan donor, sejumlah OMS memanfaatkan sumber daya pemerintah melalui hibah, swakelola, dan fasilitas program, serta mulai mengembangkan usaha berbasis komunitas. Ketergantungan terhadap pendanaan donor masih cukup tinggi, sementara kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan prioritas pendanaan pemerintah maupun donor turut membatasi akses dukungan bagi masyarakat sipil. Di sisi lain, kemampuan membangun posisi tawar yang setara dengan donor sangat dipengaruhi oleh kualitas data, gagasan program, rekam jejak organisasi, dan relasi personal yang terbangun. Kapasitas pengelolaan unit usaha sebagai sumber pendanaan berkelanjutan juga belum menjadi kekuatan utama sebagian besar OMS.

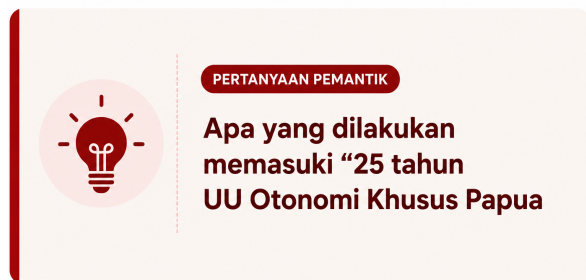
Rekomendasi Prioritas

1. Kesamaan persepsi dan komitmen OMS secara kolektif untuk dana kolaborasi yang dapat mendukung agenda-agenda kolaboratif
2. Mendorong lahirnya konsorsium OMS untuk pendanaan Papua.

Dimensi Regulasi Pendukung

Kebijakan pendukung dalam kerangka regulasi di Papua cukup banyak lahir dari Otonomi Khusus, diantaranya UU Otsus sendiri terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dasar. Regulasi turunannya terdapat perdasus dan perdasi yang mengatur hak

ulayat, perlindungan pertanian berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi asli Papua, pemulihan perempuan korban kekerasan, dll. Dimensi Regulasi Pendukung



Gambar 4. Pertanyaan Pemantik

Kebijakan pendukung dalam kerangka regulasi di Papua cukup banyak lahir dari Otonomi Khusus, diantaranya UU Otsus sendiri terkait pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dasar. Regulasi turunannya terdapat perdasus dan perdasi yang mengatur hak ulayat, perlindungan pertanian berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi asli Papua, pemulihan

perempuan korban kekerasan, dll.

Meskipun telah ada inpres tentang pengarusutamaan gender, implementasinya masih ada gap pemaknaan dan kebijakan daerah belum interseksional. Pada saat yang sama, masyarakat sipil mendorong partisipasi masyarakat kampung untuk terlibat intervensi kebijakan seperti perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) ataupun perlindungan perempuan dan anak. Masyarakat sipil Papua juga mempengaruhi lahirnya Perda Bantuan Hukum untuk kelompok rentan.

Rekomendasi Prioritas

1. Membaca ulang implementasi kebijakan Otsus Papua melalui review dan evaluasi Perdasus dan Perdasi
2. Penguatan partisipasi masyarakat sipil dan mendorong serta mengawal kebijakan untuk memastikan perlindungan hak-hak warga dan kelompok rentan di Papua, termasuk kebijakan Otsus.

Dimensi Konsolidasi dan Narasi Advokasi

Pembangunan kekuatan masyarakat sipil di Papua melalui berbagai forum, konsorsium, dan inisiatif lintas isu yang melibatkan masyarakat adat, kelompok perempuan, pemuda, dan komunitas lingkungan. Narasi advokasi yang dibangun juga kuat. Misalnya, “tanah dan hutan” adalah mama serta istilah “sasi” yang berkaitan dengan model-model pengaturan adat tentang pengelolaan SDA. Namun, integrasi prinsip GEDSI di ruang publik masih menghadapi tantangan karena belum sepenuhnya didukung oleh layanan yang inklusif dan aksesibel.

Rekomendasi Prioritas

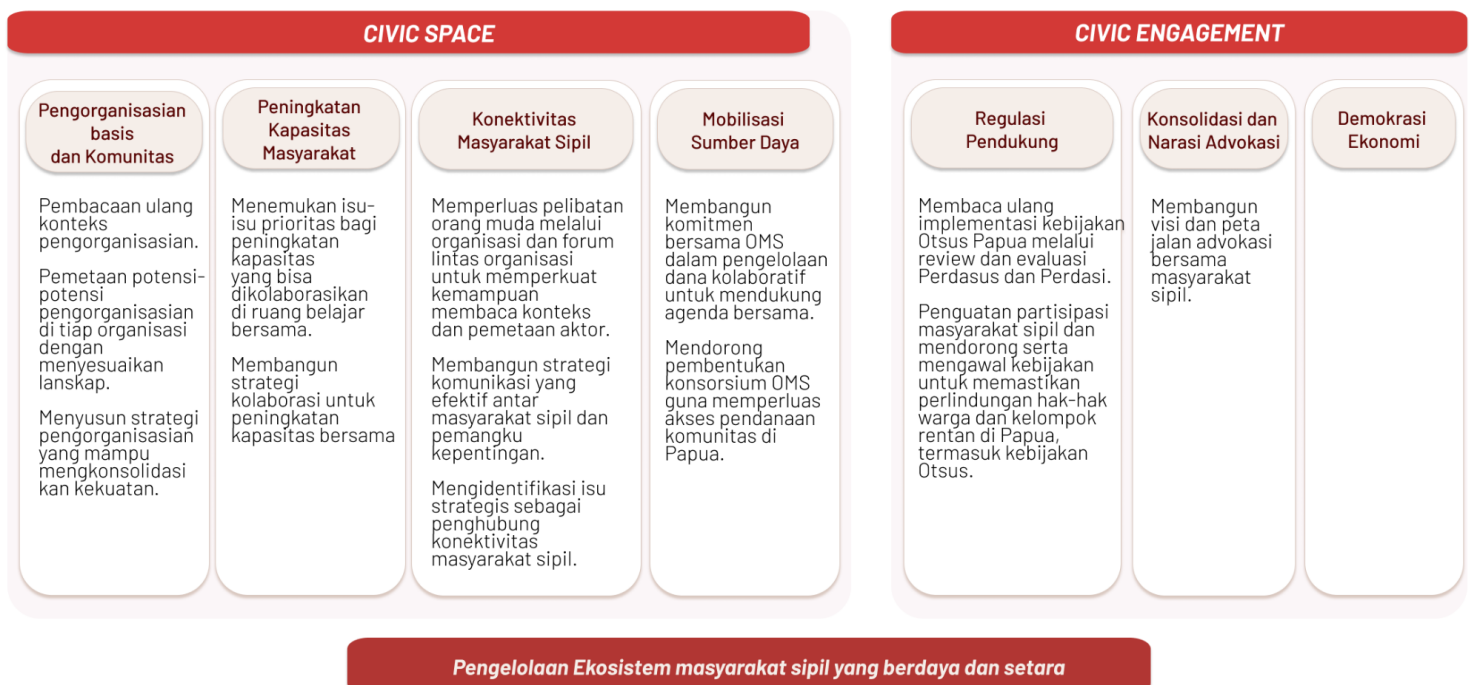
1. Mensinergikan spirit OMS bersama masyarakat untuk memperkuat dan memperluas advokasi yang lebih inklusif.

Dimensi Demokrasi Ekonomi

Praktik ekonomi berbasis komunitas seperti pengelolaan cokelat, budidaya sereh wangi, hingga pengolahan pangan lokal menunjukkan potensi kemandirian ekonomi dari akar rumput. Pemanfaatan jaringan pemasaran baik secara daring maupun melalui instansi terkait telah membantu masyarakat menjangkau pasar yang lebih luas. Tantangannya adalah keberlanjutan program dan masih bergantung pada dukungan pendampingan. Akhirnya, demokrasi ekonomi di Papua harus diarahkan pada penguatan tata kelola ekonomi komunitas dan pembentukan model kelembagaan yang berkelanjutan.

Sintesis Penilaian CIVICA Papua

Sesi refleksi terhadap ruang sipil dan keterlibatan publik menghasilkan rangkuman rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 5. Sintesis Penilaian CIVICA Papua

Kesimpulan

Konsolidasi masyarakat sipil Papua menghasilkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi ruang sipil melalui tujuh dimensi utama menggunakan instrumen CIVICA. Hasil refleksi menunjukkan bahwa masyarakat sipil Papua memiliki kekuatan berupa jangkauan kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang luas hingga ke seluruh Tanah Papua, strategi pengorganisasian yang beragam dan kontekstual, serta narasi advokasi yang membudaya seperti konsep "tanah dan hutan" sebagai mama dan sistem adat "sasi". Di sisi regulasi, kerangka Otonomi Khusus beserta turunannya seperti Perdasus dan Perdasi dapat memberikan landasan perlindungan hak-hak warga.

Namun demikian, masyarakat sipil Papua masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi secara kolektif. Konektivitas lintas isu dan sektor antar-OMS masih lemah, kapasitas pengelolaan sumber daya mandiri dan unit usaha berkelanjutan belum kuat, serta isu perlindungan dan keamanan bagi masyarakat sipil belum terinternalisasi secara luas dan kuat. Situasi diperparah dengan adanya intervensi militer, kebijakan yang merugikan sosial dan ekonomi, kesenjangan generasi, hingga stigma terhadap Papua. Oleh karena itu, penguatan kerja kolektif, pembangunan konsorsium pendanaan bersama, pelibatan lebih untuk generasi muda, serta peningkatan kapasitas analisis kebijakan menjadi hal strategis bagi gerakan masyarakat sipil di Papua ke depan.

Ke depan, penguatan masyarakat sipil di Sultra membutuhkan tiga pilar utama: pertama, konsolidasi jaringan lintas isu dan wilayah yang sistematis, bukan sekadar berbasis momentum atau kedekatan personal; kedua, pembangunan sistem pengetahuan bersama yang mencakup tetapi tidak terbatas pada basis data kepakaran OMS, dokumentasi praktik advokasi, dan sumber daya; ketiga, penguatan ekonomi berbasis komunitas menjadi narasi alternatif terhadap model pertumbuhan ekonomi ekstraktif. Masyarakat sipil akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan besar seperti PSN, maka konsolidasi yang lebih kokoh akan menjadi kekuatan. Dengan terbentuknya CEA Regio Sultra dapat menjadi simpul strategis untuk mendorong agenda-agenda bersama.